

Konektivitas Subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle) di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau

Rizqi Apriani Putri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: raputri@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan konektivitas sub regional keanggotaan daerah, termasuk IMT-GT, di wilayah perbatasan. Peluang dari penerapan berdasarkan undang-undang ini, daerah dapat memanfaatkannya untuk bekerja sama dengan negara lain atau pihak asing. Kepulauan Riau adalah salah satu anggota sub regional IMT-GT. IMT-GT merupakan kerja sama trilateral yang dilakukan oleh tiga negara Indonesia, Malaysia, Thailand. Kerja sama ini didasarkan pada lokasi strategis yang meliputi perbatasan darat dan laut antara ketiga negara. Keberlangsungan kerja sama trilateral IMT-GT ini merupakan substansi dari proyeksi visi IMT-GT pada tahun 2026. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan mengidentifikasi potensi konektivitas sub regional dalam kerja sama IMT-GT dan potensi strategis Kepulauan Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Berbagai pilar strategis dapat diambil dalam kerja sama sub regional ini yang akan berdampak pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Keterlibatan Kepulauan Riau menjadi tuan rumah pada tahun 2023 akan berdampak pada peningkatan kapasitas aktor kunci dan aktor lainnya. Kepulauan Riau memiliki potensi strategis di daerah perbatasan dengan negara lain

Kata kunci: IMT-GT; Kerja sama; Konektivitas; Perbatasan; Subkawasan

ABSTRACT

This study aims to determine the development of regional membership's sub regional connectivity, including IMT-GT, in border areas. Opportunities from the application based on this law, areas can take advantage of it to cooperate with other countries or foreign parties. Kepulauan Riau is one of the sub regional members of IMT-GT. IMT-GT is a trilateral cooperation carried out by three countries Indonesia, Malaysia, Thailand. This cooperation is based on a strategic location covering land and sea borders between the three countries. The sustainability of this trilateral IMT-GT cooperation is the substance of the projected vision of IMT-GT in 2026. The research method used is a qualitative approach that will identify the potential of sub regional connectivity in IMT-GT cooperation and the strategic potential of the Riau Islands. This research is field research by collecting primary and secondary data relevant to the research. Various strategic pillars can be taken in this sub regional cooperation that will impact the community's social and economic sectors. The involvement of Riau Islands in hosting in 2023 will impact increasing the capacity of key actors and other actors. Kepulauan Riau has strategic potential in border areas with other countries.

Keywords: Border; Connectivity; Cooperation; IMT-GT; Subregional

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan dari regionalisasi menghubungkan berbagai negara-negara sebagai penggerak utama sebagai pendorong utama politik, budaya dan ekonomi. Adanya interkoneksi dalam pembangunan global ini menciptakan sebuah sinergitas di tingkat subnasional (regional) (Kuznetsov, 2015). Bagi suatu negara dengan letak geografis berbatasan dengan negara tetangga memiliki keistimewaan sendiri. Bagi suatu negara yang memiliki letak geografis berbatasan dengan negara tetangga, wilayah perbatasan memiliki keistimewaan tersendiri dan berperan penting dalam mencerminkan kedaulatan serta integritas wilayah negara tersebut. Pemerintah pusat akan mendukung dalam konektivitas masyarakat di wilayah perbatasan (Try Setyasih et al., 2020).

Globalisasi dan regionalisme akan meningkatkan intensitas kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang. Kerja sama ini akan berkembang dari berbagai bidang yang akan dijalankan untuk mendukung neraca perekonomian serta mempererat hubungan diplomatik negara tersebut. Pola hubungan internasional timbal balik ini dapat ditemukan antara negara-negara yang secara ekonomi memenuhi syarat sebagai negara maju, serta antara negara maju dan negara berkembang atau negara berkembang sendiri. Dengan pembaharuan kerja sama intra-ASEAN ini, perlu adanya kejelasan dan pengaturan yang pasti mengenai hak, kewajiban, wewenang, tanggung jawab, dan pembatasan bagi para pihak yang akan memberikan jaminan keadilan, manfaat, perlindungan, dan kepastian hukum. Kerja sama ekonomi "Intra-ASEAN" yang dapat diamati menunjukkan proses kematangan yang bergerak dinamis dengan selalu melakukan kajian terhadap dampak yang timbul dari proses yang berlaku di lingkungan eksternal dan internal ASEAN. Kerja sama yang dipimpin melalui AFTA bertujuan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dinamis sehingga kawasan ini saat ini dan di masa depan masih menarik bagi investasi asing atau relokasi industri.

Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) adalah zona ekonomi transnasional melintasi batas-batas geografis, meliputi tiga atau lebih negara, perdagangan eksternal dan menarik investasi ke dalam. Kelompok perdagangan sub-regional ini biasanya memanfaatkan hubungan saling melengkapi antar wilayah yang berdekatan secara geografis dari negara-negara berbeda untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam ekspor *Growth Triangle* biasanya mencakup sebagian wilayah dari negara-negara peserta, kecuali beberapa negara kecil seperti Hong Kong, Singapura, dan Brunei, serta terdiri dari negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang beragam. Salah satu ciri utama dari *Growth Triangle* adalah pembentukannya yang difasilitasi oleh pemerintah negara-negara yang terlibat. Proses ini memerlukan tingkat koordinasi dan perencanaan yang tinggi antar lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, mengingat peran strategis kepala daerah di wilayah perbatasan (Munir et al., 2021). Berikut adalah tabel yang menggambarkan beberapa contoh *Growth Triangle* yang ada di kawasan Asia.

Tabel 1.1 *Growth Triangle* yang ada di kawasan Asia

Name of Growth Triangle	Area Covered
The Southern China Growth Triangle	Hong Kong, China's Guangdong and Fujan Provinces and Taiwan
The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)	Singapore, Johor, Pahang, and Malacca states o Malaysia and Riau Province of Indonesia
The Bath Zone	Border areas of Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar
The Yellow Sea Economic Zone	Coastal areas facing the Yellow Sea of north and north-east China, north and south Korea and Japan
The Japan Sea Economic Zone	
The East ASEAN Growth Area (EAGA)	Coastal areas facing the Yellow Sea of north and north-east China, north and south Korea and Japan
The Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Thailand, Indonesia and east Malaysia
The Tumen River Delta	Southern Thailand, northern Malaysia and two Indonesian provinces in Sumatera
	Parts of China, north Korea and Rusia

Sumber: (Munir et al., 2021)

Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) muncul karena mereka memiliki peluang besar untuk asing langsung arus investasi (FDI) dan perubahan investasi langsung di Asia Timur dan Asia Tenggara. Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) menciptakan peluang bagi industri berbasis tenaga kerja untuk dipindahkan ke negara tetangga yang masih luas. Masing-masing negara anggota memiliki keunggulan komparatifnya asing-masing yang akan memiliki perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) juga menggabungkan kawasan perkotaan pinggiran kota, dan kawasan yang kurang berkembang. Tantangan yang dihadapi oleh kawasan Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi dari pengembangan sarana prasarana serta infrastruktur yang diberikan oleh negara penanam modal (Munir et al., 2021).

Salah satu kerja sama yang akan dikaji di dalam penelitian ini dalam koridor kerja sama trilateral IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle). Kerja sama IMT-GT diumumkan pada tanggal 20 Juli tahun 1993 di dalam The Ministerial Meeting (MM) di Langkawi, Malaysia secara formal kepada PBB. Tujuan terbentuknya kerja sama ini untuk

meningkatkan pembangunan investasi, infrastruktur serta ekonomi dalam suatu kawasan triangle tersebut. (Raharjo, 2023) Kerja sama triangle IMT-GT, ini guna kesadaran dalam perkembangan ekonomi masyarakat, kesejahteraan di wilayah perbatasan negara-negara anggota IMT-GT. Kerja sama ini diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand melalui tiga perwakilan yaitu Dr. H.E Tun Dr Mahathir Mohamad (Menteri Malaysia), Presiden Suharto (Presiden Indonesia saat itu) dan Chuan Leekpai (Menteri Thailand) Kerja sama ekonomi IMT-GT merupakan implementasi dari Master Plan on ASEAN Connectivity yang bertujuan untuk membangun konektivitas antar negara anggota ASEAN (Faridatussalam et al., 2023).

Kerja sama ekonomi subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yang merupakan jawaban antisipatif atas implementasi AFTA cukup baik jika dilihat dari objek yang akan dikerjasamakan. Namun, perbedaan kemajuan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta sistem dan instrumen hukum yang berlaku di antara negara-negara ASEAN merupakan masalah atau hambatan dalam proses kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Kerja sama sub regional dalam pertumbuhan kawasan ini, menjadi peluang untuk menyiapkan potensi daerah maupun lokal berdaya saing tinggi. Pemerintah dan sektor swasta, juga memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh globalisasi dan perdagangan bebas (Fadhil, 2023).

Kerja sama Trilateral IMT-GT terdiri dari tiga negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kawasan ini ditetapkan menjadi kerangka proyeksi IMT-GT dikarenakan letak geografis yang strategis di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Thailand Selatan berbatasan darat dengan Malaysia Barat yang dipisahkan oleh Pulau Sumatera. Sedangkan Indonesia dan Malaysia dilalui oleh Selat Malaka. Keanggotaan Sub-Kawasan dari Indonesia terdiri dari 9 daerah; Malaysia terdiri dari 11 daerah; sedangkan Thailand memiliki cakupan sub-kawasan yang lebih luas berjumlah 14 daerah. Dari ketiga negara ini dan Singapura menjadi pasar perdagangan untuk Asia Tenggara, seperti yang dicantumkan dalam tabel 1.2 Wilayah Sebaran Keanggotaan IMT-GT

Tabel 1.2 Wilayah Sebaran Keanggotaan IMT-GT

No	Indonesia-GT	Malaysia-GT	Thailand-GT
1	Aceh	Johor	Chumphon
2	Bangka Belitung	Kedah	Krabi
3	Bengkulu	Kelantan	Nakhon Si Thammarat
4	Jambi	Melaka	Narathiwat
5	Lampung	Negeri Sembilan	Phang Nga
6	Sumatera Utara	Pahang	Phatthalung
7	Riau	Penang	Phuket
8	Kepulauan Riau	Perak	Ranong
9	Sumatera Selatan	Perlis	Satun
11		Terengganu	Surat Thani

12			Trang
13			Yal
14			Pattani

Sumber: IMT-GT (2021)

IMT-GT merupakan bentuk kolaborasi ekonomi antarwilayah yang berada di perbatasan negara dan memiliki karakteristik saling melengkapi satu sama lain. Kolaborasi ini biasanya melibatkan sebagian wilayah dari masing-masing negara peserta, bukan keseluruhan negara, dan bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi regional melalui pemanfaatan keunggulan lokal. Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam IMT-GT berperan aktif dalam merancang zona pertumbuhan ini sebagai sarana untuk memperluas investasi, meningkatkan perdagangan lintas batas, dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan kawasan ekonomi yang lebih terhubung, inklusif, dan kompetitif (Global Connectivities, 2024).

Inisiatif Kerja sama sub regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dibentuk sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan hubungan lintas batas, baik dari segi infrastruktur, arus barang dan jasa, maupun integrasi pasar di antara wilayah yang berdekatan dari ketiga negara. Posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis, terletak di jalur pelayaran internasional dan dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menjadikannya kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui skema IMT-GT. Melalui penguatan konektivitas, pembangunan fasilitas pendukung perdagangan, serta sinergi kebijakan antar negara, Kepulauan Riau dapat didorong menjadi pusat logistik regional dan simpul pertumbuhan ekonomi baru (Riawan & Akbar, 2024).

Berdasarkan blue print IMT-GT, terdapat tujuh pilar strategis untuk mendukung pencapaian Visi 2036. Tujuh pilar yang telah diidentifikasi dengan cermat sebagai area fokus utama yang dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial paling signifikan pada subkawasan selama periode 2017-2026 adalah (a) Pertanian dan Industri Berbasis Agro; (b) Pariwisata; (c) Produk dan Layanan Halal; (d) Transportasi dan Konektivitas TIK; (e) Fasilitas Perdagangan dan Investasi; (f) Lingkungan Hidup; dan (g) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mendukung promosi IMT-GT dalam sub regional yang ramah dalam perdagangan dan investasi (Trade and Investment Facilitation in blue print IMT-GT) di tahun 2026.(CIMT, 2022) Berbagai tujuan yang akan dilakukan yaitu Menetapkan garis dasar pada perdagangan intra-IMT-GT dan arus masuk foreign direct investment (FDI) ke social economic zones (SEZs) atau zona ekonomi yang dipilih untuk pemantauan kinerja (IMT-GT Vision 2036, 2018).

Gambar 1.1 Peta Wilayah IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-Growth Triangle)



Sumber: Centre for IMT-GT Sub regional Cooperation (2021)

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang menjadikan Provinsi ke 32 di Indonesia. Letak Geografis Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Batas wilayah Kepulauan Riau, bagian barat yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Di Sebelah Utara: Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan: Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Sebelah Timur: Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua (2) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima (5) kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas (Gambaran Umum Kepulauan Riau, 2020).

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia ditetapkan di tahun 2002. Wilayah ini memiliki keistimewaan, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan

Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan. (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2022). Kepulauan Riau merupakan salah satu anggota dari subregion IMT-GT. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang terletak di tengah-tengah lebih dari 3.000 pulau, memiliki kepentingan strategis dalam Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Diposisikan di dekat rute pelayaran internasional utama dan berdekatan dengan Singapura, Kepri memanfaatkan lokasi geografisnya untuk meningkatkan arus perdagangan, pariwisata, dan investasi di sub-kawasan. Berpartisipasi aktif dalam inisiatif IMT-GT, Kepri berfokus pada peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi integrasi ekonomi dengan Malaysia dan Thailand. Provinsi ini juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui upaya konservasi lingkungan dan pertukaran budaya, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama regional dan mencapai pertumbuhan inklusif di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terbentang dari Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan dunia hingga ke Laut Natuna. Wilayah ini yang mayoritas dikelilingi oleh lautan memiliki potensi sumber daya alam dibidang minyak, gas serta maritim. Sehingga, potensi yang dimiliki oleh Kepri dapat memberikan ruang bagi pemerintah dan stakeholder yang terkait untuk mengembangkan di sector ekonomi yang memiliki relevansi dengan Visi IMT-GT 2036. Dengan demikian, kajian ini penting untuk melihat sejauh mana kerja sama IMT-GT mampu dimanfaatkan secara optimal oleh Kepulauan Riau dalam memperkuat posisi strategisnya di kawasan sub regional. Tujuan dari penelitian ini, melihat potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau menjadi pertimbangan dalam mengupayakan peningkatan ekonomi daerah serta menjalin relasi dengan negara-negara lain terutama negara anggota IMT-GT. Relevansi teori paradiplomasi menjadikan keuntungan bagi Provinsi Kepulauan Riau agar terwujudnya kepentingan daerah perbatasan.

KERANGKA ANALISIS

Penulis menggunakan kerangka analisis untuk menjawab persoalan dari artikel ini yaitu paradiplomasi. Paradiplomasi digunakan karena memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melakukan Kerja sama dengan subkawasan dari negara lain. Paradiplomasi atau Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota masih merupakan fenomena yang relatif baru dalam praktik pemerintahan Indonesia Sub-diplomasi mengacu pada perilaku dan kemampuan entitas “sub-nasional” atau pemerintah daerah/daerah untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing dalam konteks kepentingan tertentu. Melegitimasi peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi daerah, pemerintah memberlakukan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015, peraturan mengizinkan beberapa wilayah secara terpisah mendapatkan wewenang untuk mendorong pengembangan wilayah. Dengan demikian, kemandirian dari otonomi daerah diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara

lebih efisien dan efektif untuk membentuk tata kelola pemerintah yang lebih inklusif (Agung Suhabi Putra & Nurhasan Affandi, 2022).

Kerja sama sub-regional dipandang sebagai mekanisme alternatif dan kuat untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui kerja sama lintas batas yang dilakukan oleh aktor sub-nasional. Konsep kerja sama sub-regional yang telah terjalin sejak lama serta disepakati dari berbagai negara yang memiliki letak geografis yang dekat baik itu kedekatan budaya, social, kedekatan politik, kedekatan ekonomi atau kedekatan lainnya. Umumnya, kerja sama ini dilandasi oleh faktor pendorong seperti keinginan bersama, memiliki kesamaan kondisi negara ataupun kepentingan (Keating, 2000). Di bidang hubungan internasional dan pembangunan ekonomi, konsep sub-kawasan telah muncul sebagai kerangka kerja penting untuk mendorong kerja sama, integrasi, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara tetangga atau negara-negara dalam konteks regional yang lebih besar.

Paradiplomasi mengacu pada kegiatan internasional dan keterlibatan entitas subnasional, seperti negara bagian, provinsi, atau kota, dalam diplomasi dan hubungan luar negeri di luar wewenang pemerintah nasional. Fenomena ini menjadi semakin signifikan dalam konteks globalisasi, di mana aktor subnasional memainkan peran proaktif dalam mempromosikan kepentingan mereka dan terlibat dengan komunitas internasional. Entitas subnasional terlibat dalam paradiplomasi karena berbagai alasan, termasuk pembangunan ekonomi, pertukaran budaya, kelestarian lingkungan, dan keamanan regional. Entitas-entitas ini sering memiliki keunggulan unik, seperti pengetahuan khusus, sumber daya ekonomi, atau warisan budaya, yang mereka manfaatkan untuk menarik investasi asing, menjalin kemitraan internasional, dan berpartisipasi dalam jaringan tata kelola global (Mukti, 2013). Paradiplomasi mewakili tren yang berkembang di mana entitas subnasional terlibat langsung dengan masyarakat internasional untuk mengejar kepentingan ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka. Meskipun menawarkan peluang untuk inovasi dan pemberdayaan lokal, manajemen dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi potensi risiko dalam lanskap hubungan internasional yang kompleks. (Kuznetsov, 2015)

Kerja sama sub-regional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan stabilitas politik di antara para anggotanya. Tujuan dari hal ini masing-masing untuk meningkatkan kerja sama subregional negara masing-masing. Implementasi dari Kerja sama ini, dilakukan dalam berbagai proses negosiasi untuk menghasilkan perundingan yang akan dirumuskan dalam berbagai kebijakan atau aturan agar memiliki kedudukan yang sama dalam mengimplementasikan. Di bidang ekonomi, sector perdagangan, serta investasi menjadi keunggulan dalam kerja sama subregional. Keterlibatan sector swasta memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi laju investasi satu negara. Negara juga memiliki andil dalam meningkatkan daya tarik perdagangan guna menarik investor domestik maupun investor asing. Kedekatan geografis di suatu kawasan tertentu akan memahami keunggulan masing-masing kawasan tersebut. Tiap-tiap kerja sama subregional memiliki visi dan misi yang berbeda karena memiliki kepentingan serta keadaan geografis yang berbeda juga (Septiani, 2021).

Kerja sama subregional telah berkembang dalam berbagai fase selama beberapa puluhan tahun terakhir, dipengaruhi oleh perubahan ide dan sikap terhadap globalisasi.

Perdagangan dan investasi mengalami perkembangan globalisasi, adanya liberalisasi globalisasi menciptakan kemajuan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan di kawasan. Variasi dalam integrasi ekonomi diseluruh subkawasan mencerminkan perbedaan dalam konektivitas berdasarkan letak geografis. Perdagangan global 80% melalui laut. Di Asia Tenggara, subwilayah terletak di jalur pelayaran, memberikan peluang peningkatan potensi ekonomi regional dalam kerja sama subregional. Kerja sama subregional mengacu pada upaya kolaboratif di antara negara atau wilayah tetangga dalam kerangka regional yang lebih besar untuk mengatasi tantangan bersama, mempromosikan pembangunan bersama, dan meningkatkan integrasi. Konsep ini mengakui kedekatan geografis dan kepentingan bersama negara-negara anggota, memfasilitasi tindakan terkoordinasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan di dalam sub-kawasan (Fathun, 2016; Tavares, 2016; United Nations ESCAP, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan potensi dan dinamika wilayah Kepulauan Riau dalam konteks kerja sama sub regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Analisis data dilakukan melalui eksplorasi dan interpretasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen perencanaan pembangunan daerah, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Bank Indonesia, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah di tingkat lokal, nasional, dan regional. Melalui pendekatan ini, peneliti menyusun gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan di Kota Tanjungpinang. Seluruh data kemudian dianalisis secara tematik sesuai fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana potensi Tanjungpinang dapat dioptimalkan dalam mendukung integrasi kawasan dalam kerangka kerja sama IMT-GT.

Melalui penggunaan data sekunder yang telah terdokumentasikan secara resmi, penelitian ini mampu menyajikan pemetaan yang terstruktur mengenai peran strategis Tanjungpinang dalam konteks integrasi kawasan sub regional. Lokasi Kepulauan Riau berdasarkan letak geografis yang berdekatan dengan negara tetangga menjadikannya titik penting dalam upaya penguatan konektivitas dan kerja sama ekonomi lintas negara. Analisis ini tidak hanya berfokus pada identifikasi potensi wilayah, tetapi juga mengkaji berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif berbasis data sekunder ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dinamika wilayah secara menyeluruh serta menawarkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang relevan dalam kerangka kerja sama IMT-GT.

HASIL

Globalisasi telah mendorong integrasi lintas batas yang mempercepat kerja sama ekonomi regional, termasuk dalam skala sub regional seperti konsep segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) ASEAN (Affizah AM & N, 2015). Dalam konteks Indonesia, kawasan perbatasan menjadi ruang strategis yang tidak hanya merepresentasikan kedaulatan, tetapi juga berperan penting dalam pembangunan nasional. Posisinya yang berada di wilayah pinggiran menjadikannya rentan namun vital, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang berfokus pada pemerataan dan penguatan peran masyarakat lokal. Pembangunan perbatasan harus melampaui dimensi infrastruktur dan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, keamanan maritim, serta keadilan sosial, sejalan dengan visi Nawacita (Septiani, 2021). Dengan demikian, kawasan perbatasan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam strategi integrasi dan ketahanan negara.

'Kerja sama Sub regional dalam IMT-GT

Kerja sama *sub regional* dipandang sebagai mekanisme alternatif dan kuat untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui kerja sama lintas batas yang dilakukan oleh aktor subnasional. Kedekatan geografis di suatu kawasan tertentu akan memahami keunggulan masing-masing kawasan tersebut. Tiap-tiap kerja sama sub regional memiliki visi dan misi yang berbeda karena memiliki kepentingan serta keadaan geografis yang berbeda juga (Keating, 2000). Kerja sama ekonomi sub regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), yang merupakan jawaban antisipatif atas implementasi AFTA, cukup baik jika dilihat dari objek yang akan diKerja samakan. Namun, perbedaan kemajuan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, serta sistem dan instrumen hukum yang berlaku di antara negara-negara ASEAN merupakan masalah atau hambatan dalam proses kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Di sinilah letak pentingnya mengatur kerja sama ekonomi sub regional yang menjadi masalah utama dalam penulisan karya ilmiah ini. Segitiga Pertumbuhan dan Area Pertumbuhan adalah alat kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan daerah, baik pemerintah daerah maupun sektor swasta, untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh globalisasi dan perdagangan bebas.

Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan inisiatif kerja sama sub regional yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dibentuk pada tahun 1993. Sebagai kemitraan ekonomi yang dipimpin sektor swasta, IMT-GT bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi melalui optimalisasi keunggulan komparatif di wilayah perbatasan tiga negara. Kerangka konseptual ADB mendukung inisiatif ini dengan fokus pada identifikasi peluang dan hambatan bisnis. Dalam konteks Indonesia, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Meskipun struktur administratif yang sentralistik membatasi fleksibilitas daerah, upaya desentralisasi dan dekonsentrasi tengah dilakukan untuk memperkuat peran daerah dalam kerja sama ekonomi lintas batas. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis perbatasan

yang luas menjadikan partisipasinya dalam kerja sama sub regional seperti IMT-GT semakin strategis (Wong Villanueva et al., 2020).

Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah sangat penting karena Aparatur Pemerintah Daerah merupakan garda terdepan dalam mendukung usaha swasta di daerah. Kerja sama ekonomi sub regional dilakukan oleh swasta/pengusaha dan diarahkan oleh kekuatan pasar. Tantangan bagi pemerintah adalah menciptakan seperti iklim bagi kekuatan pasar untuk terbentuk dan berfungsi dengan baik. Menciptakan kondusif iklim investasi dan perdagangan adalah kunci untuk menarik kegiatan ekonomi (Fadhil, 2023). Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dijalin pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia pada tanggal 20 Juli 1993. IMT-GT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong untuk menjadi "mesin pertumbuhan". Untuk tujuan ini, sebuah forum untuk pengusaha di daerah IMTGT yang disebut Joint Business Council (JBC) telah dibentuk. JBC secara aktif terlibat dalam seri SOM / MM IMT-GT setiap tahun. Wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari Kerja sama IMT-GT adalah provinsi: Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Anomsari & Razak, 2017; Candra et al., 2024).

Terjalannya kemitraan ini akan memperkuat komunitas bisnis dan pemerintah daerah. Para pemimpin akan mempromosikan intik berfokus pada investor. IMT-GT merupakan kerjsama sub regional yang cangkupannya lebih luas disbanding SIJORI (Singapore, Johor dan Riau). Pembentukan IMT-GT ini sebagai tindak lanjut dari pengembnagan kerja sama yang telah terjalin antara pengusaha-pengusaha swasta dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Xiaodong, 2019). Dengan demikian, pengembangan kerja sama ekonomi sub regional IMT-GT sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata hingga berkeseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang telah dimiliki masing-masing wilayah. Sektor ekonomi yang dipilih dalam penelitian ini karena memberikan aspek kecepatan dan ketepatan serta dipertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Sector ekonomi juga mendukung konektivitas penguatan di kawasan tersebut seperti perdagangan, investasi, pariwisata.

Asia Tenggara pada periode pasca-Perang Dunia II telah dianggap sebagai tempat dengan dinamika yang berubah, seperti karena memperkuat hubungan luar negeri, mengurangi ketegangan intra-regional dan meningkatkan keamanan dalam negeri. Meskipun masih ada pemberontakan lokal, ketidaksepakatan politik dan, perbedaan ideologis, banyak kemajuan dalam kerja sama ekonomi regional, dan integrasi telah dibuat oleh Asia Tenggara. Dibuktikan dengan peresmian KTT Bali pada tahun 1976, ketika kerja sama resmi di negara-negara ASEAN diumumkan (Rosnani et al., 2022). Dalam hal ini, wakil perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, mengumumkan pembentukan Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Kepulauan Riau (SIJORI-GT) pada tahun 1989, dengan tujuan untuk mempromosikan lebih banyak kerja sama ekonomi antara tiga wilayah tetangga. Bertujuan

untuk meningkatkan redistribusi dan pertukaran keunggulan komparatif regional, seperti arus besar investasi asing, letak geografis, tenaga kerja, modal, teknologi, dll.

Di satu sisi, Singapura berperan sebagai pusat perdagangan dan keuangan paling signifikan di Asia Tenggara, didukung oleh ketersediaan modal yang besar, tenaga kerja terampil, teknologi maju, akses yang luas ke pasar global, serta infrastruktur yang berkembang pesat. Sebaliknya, wilayah Johor (Malaysia) dan Kepulauan Riau (Indonesia) masih menghadapi keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut, yang berdampak pada lambatnya pembangunan ekonomi di kedua kawasan. Di sisi lain, Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam, lahan, dan tenaga kerja tidak terampil, yang justru tersedia secara melimpah namun kurang dimanfaatkan di wilayah Johor dan Kepulauan Riau. Perbedaan karakteristik yang saling melengkapi ini menjadi dasar potensial bagi penguatan kerja sama *triangle* melalui relokasi industri, pembentukan rantai pasok baru, dan optimalisasi struktur ekonomi kawasan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mendorong integrasi ekonomi regional, tetapi juga memperkuat resiliensi kolektif dalam menghadapi tekanan dari pasar global.

Tabel 1.3 Perkembangan IMT-GT

Periode	Fokus Utama
1993–1994	Pembentukan IMT-GT untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah perbatasan.
1995–2000	Penguatan kerja sama sektor swasta melalui pembentukan Joint Business Council.
2001–2006	Penyesuaian strategi pasca krisis ekonomi Asia; fokus pada pembangunan infrastruktur.
2007–2011	Implementasi Cetak Biru pertama; penguatan konektivitas dan integrasi ekonomi.
2012–2016	Pengembangan koridor ekonomi dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
2017–2021	Pelaksanaan Cetak Biru kedua; penekanan pada inovasi dan pembangunan berkelanjutan.
2022–2026	Implementasi Cetak Biru ketiga; fokus pada transformasi digital dan pemberdayaan UMKM.
2036 (Visi)	Mewujudkan subkawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Pada tanggal 17 Desember 1994, kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh perwakilan negara-negara peserta untuk memperluas SIJORI-GT menjadi suatu pengelompokan baru, yaitu Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT). Kerja sama sub regional ini kemudian berkembang seiring munculnya

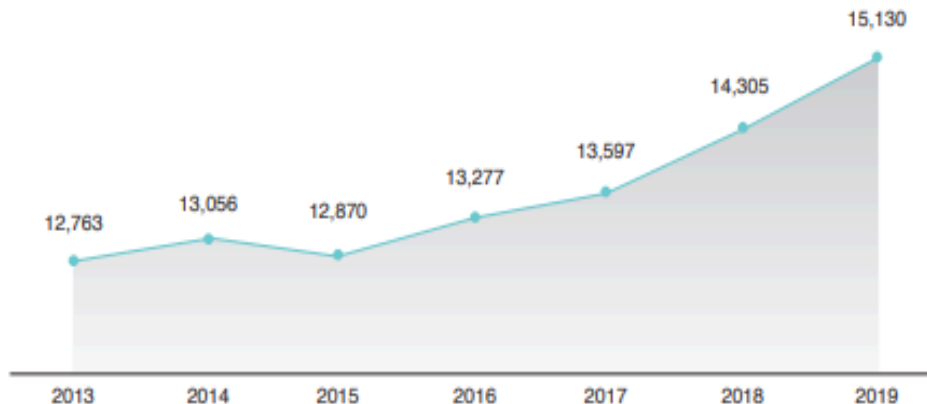
inisiatif serupa, seperti IMT-GT, BIMP-EAGA, dan GMS-GT, yang melibatkan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan beberapa negara lain di sepanjang Sungai Mekong (Raharjo et al., 2017; Xiaodong, 2019).

Kerja sama subkawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang dibentuk pada tahun 1993 telah menunjukkan perkembangan signifikan selama lebih dari tiga dekade yang dapat dilihat dalam tabel 4.2 Perkembangan IMT-GT. Inisiatif ini awalnya ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang relatif tertinggal, melalui kolaborasi lintas negara dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun sempat terhambat oleh krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, IMT-GT berhasil memulihkan momentum dengan menyusun Cetak Biru pembangunan jangka menengah yang dimulai pada 2007. Dari periode tersebut hingga kini, kerja sama ini telah berkembang dari sekadar pertumbuhan ekonomi menjadi integrasi pembangunan berkelanjutan yang mencakup konektivitas fisik, transformasi digital, penguatan UMKM, hingga pariwisata lintas negara

Secara positif, IMT-GT berhasil mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) subkawasan, memperkuat konektivitas antarwilayah dengan puluhan proyek infrastruktur, dan mendorong integrasi sektor swasta melalui platform seperti IMT-GT Mall. Program seperti Visit IMT-GT Year 2023–2025 juga menegaskan komitmen untuk membangun identitas kawasan yang kuat di sektor pariwisata dan budaya. Selain itu, langkah-langkah kerja sama dalam sektor strategis seperti kelapa sawit, karet, dan ekonomi biru menunjukkan pergeseran arah kebijakan menuju keberlanjutan dan inovasi. Namun demikian, tantangan tetap ada. Ketimpangan pembangunan antarwilayah anggota, kompleksitas koordinasi lintas negara, serta respons terhadap dinamika global seperti pandemi dan regulasi perdagangan internasional menjadi hambatan yang perlu dikelola secara strategis. Implementasi proyek yang ambisius juga membutuhkan kapasitas kelembagaan dan pendanaan yang stabil agar dampaknya dapat merata. Oleh karena itu, agar visi IMT-GT 2036 tercapai yakni membangun subkawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan peningkatan komitmen politik, konsistensi kebijakan, dan penguatan peran pemangku kepentingan lokal.

Para pemimpin IMT-GT mengadopsi IMT-GT Vision 2036 dan *Implementation Blue Print* (IB) 2017–2021 pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-10 di Manila pada April 2017. Dilihat dari grafik 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Subkawasan IMT-GT, 2013–2019, hasil dari IB 2017–2021 yaitu adanya ekspansi ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita subkawasan meningkat dari tahun 2013–2019. Perkembangan di laju sehat di tahun 2013 yaitu \$12.763 mengalami laju sehat hingga menjadi \$ 15,130 pada tahun 2019 yang dapat dilihat dari grafik 1.1 dibawah ini. Namun, di tahun 2020–2021 pertumbuhan tidak mengalami kemajuan dikarenakan pandemic Covid-19.

Grafik 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Subkawasan IMT-GT, 2013–2019



Sumber: Centre for IMT-GT Sub regional Cooperation (2021)

Indikator :

1. *Produk domestik bruto (PDB) per kapita dihitung pada paritas daya beli saat ini (PPP) \$.*
2. *Data GDP per kapita tidak termasuk Johor, Pahang, and Terengganu. Data 2020 tidak tersedia saat dilakukan pengumpulan data di bulan February 2022*

Melalui grafik 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Subkawasan IMT-GT, 2013–2019, untuk mengukur kekuatan pasar internal IMT-GT berdasarkan indikator 1 (nilai PDB riil) yaitu daya beli saat ini. Akan tetapi, ada tantangan dalam penggabungan data tersebut dikarenakan setiap dari provinsi negara anggota IMT-GT memiliki perhitungan basis data yang berbeda. Indonesia menghitung bersumber basis pada tahun 2010, Malaysia menggunakan dari tahun 2015 tahun dasar. Sedangkan, Thailand menggunakan ukuran volume rantai untuk menghitung PDB riil. Indikator lainnya untuk menghitung tingkat signifikan dapat dilihat dari daya beli orang di subkawasan IMT-GT, dengan asumsi semakin tinggi PDB per kapita maka semakin kuat kemampuan daya beli mereka. Sehingga, indikator ini dengan pertumbuhan populasi akan memberikan indikasi tentang ukuran pasar internal. IMT-GT juga akan memberikan kontribusi terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

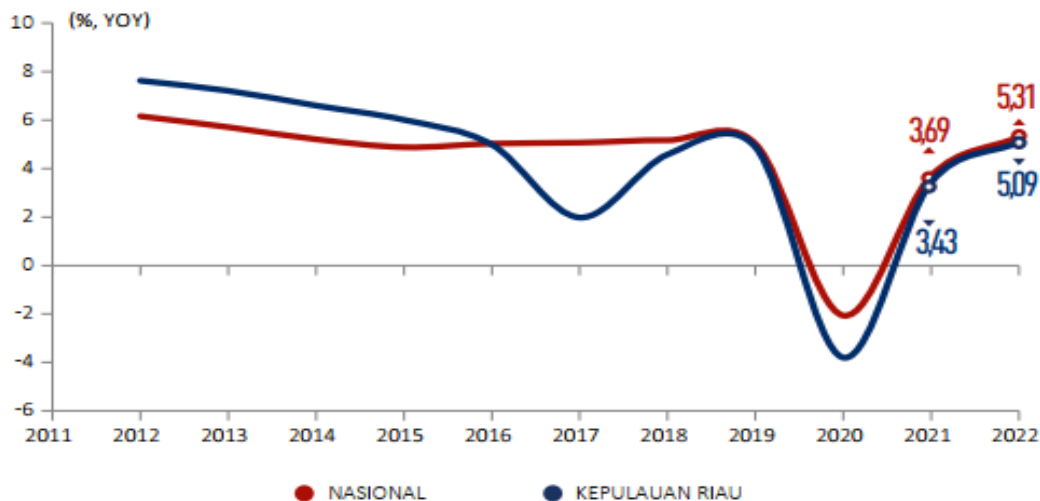
Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya pusat lalu lintas pelayaran internasional, khususnya di kawasan Laut Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. Kawasan ini kini menjadi sorotan global karena potensi konflik klaim wilayah, terutama dari China, yang menganggap wilayah tersebut bagian dari sejarahnya. Selain itu, tingginya aktivitas perdagangan di jalur ini juga menimbulkan kerentanan terhadap kejahatan lintas negara seperti illegal fishing dan human trafficking. Kompleksitas masalah ini menjadikan isu keamanan laut tidak hanya sebagai urusan nasional, tetapi juga regional dan multilateral, seiring meningkatnya kepentingan ekonomi, politik, dan

pertahanan di kawasan perbatasan (Fibrianto et al., 2022; Hadi Nugroho et al., 2020; Pangemanan et al., 2021).

Dampak dari Kerja sama Subregion IMT-GT di Kepulauan Riau

Pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan strategis yang berbasis pada identifikasi potensi dan hambatan ekonomi di tiap kawasan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya wilayah perbatasan yang belum berkembang secara optimal, terutama yang berbatasan langsung dengan negara seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Kepulauan Riau merupakan contoh konkret wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dominasi aktivitas ekonomi lintas batas, ditandai dengan kuatnya interaksi sosial dan ekonomi masyarakat lokal dengan mitra di Singapura dan Malaysia. Ketergantungan ini, meskipun menguntungkan dalam jangka pendek, berisiko melemahkan kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan kembali ekonomi berbasis masyarakat lokal perlu didorong sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi perbatasan. Intervensi kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi domestik menjadi krusial untuk mengurangi dominasi eksternal dan memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan perbatasan.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau dan Nasional dari Tahun 2012-2022



Sumber : Bank Indonesia Kepri (2023)

Pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,40% (yoy). Pertumbuhan tersebut konsisten mengalami peningkatan sejak triwulan I 2022 dan merupakan yang tertinggi di antara provinsi se-Sumatera serta lebih tinggi dari Nasional yang tumbuh sebesar 5,03% (yoy). Sehingga, perkembangan perekonomian Kepri menempati posisi ke 4 tertinggi se-Indonesia. Faktor pendorong pertumbuhan ini salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang masih dan laju investasi yang sejalan dengan mobilitas masyarakat pasca Covid-19 yang berangsur membaik. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan dalam sektor transportasi, hotel dan restoran. Dalam sektor industri pengolahan cukup tinggi dalam memproduksi logam, optik, alat angkutan laut hingga produk dari elektronik (Bank Indonesia, 2023). Grafik 1.2 ini memperlihatkan laju pertumbuhan Kepulauan Riau dengan nasional dari tahun 2012-2022. Di tahun 2020 mengalami penurunan ekonomi baik dari nasional maupun Kepulauan Riau dampak dari pandemik Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mulai mengalami peningkatan sejalan dengan keterbukaan mobilitas masyarakat di Kepulauan Riau maupun negara lain (Fadhil, 2023).

Tabel 1.4 Perkembangan IMT-GT di Kepulauan Riau (Kepri)

Periode	Perkembangan IMT-GT di Kepulauan Riau (Kepri)
1993–1994	Awal pembentukan IMT-GT; Kepri belum berperan aktif, namun letaknya yang strategis mulai diperhitungkan.
1995–2000	Batam mulai dikembangkan sebagai kawasan industri dan perdagangan; investor swasta mulai masuk.
2001–2006	Fokus pembangunan infrastruktur; pengembangan Pelabuhan Batam dan konektivitas ke Singapura dan Malaysia.
2007–2011	Dukungan terhadap Cetak Biru pertama; promosi kawasan perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).
2012–2016	Penguatan koridor ekonomi; Kepri menjadi bagian dari konektivitas laut dan perdagangan regional.
2017–2021	Peningkatan peran digitalisasi dan logistik pelabuhan; Batam mulai menjadi simpul inovasi industri digital.
2022–2026	Penguatan sektor UMKM dan pariwisata lintas batas; promosi digitalisasi di Bintan dan Natuna.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan tabel 1.3 perkembangan IMT-GT di Kepulauan Riau (Kepri), Peranan Kepulauan Riau (Kepri) dalam skema IMT-GT telah bertransformasi signifikan sejak era awal hingga kini. Pada periode pembentukan IMT-GT (1993–1994), Kepri mulai diperhitungkan secara geografis meski belum menjalankan peran aktif; letaknya di jalur pelayaran antarnegara sudah menarik perhatian pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada 1995–2000, Batam merebut sorotan sebagai kawasan industri dan perdagangan yang didorong masuknya modal

swasta, menegaskan status Kepri sebagai pintu gerbang ekonomi subkawasan. Pada tahun 2001–2006, fokus bergeser ke pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas darat, dengan pelabuhan Batam diperluas dan jaringan transportasi dipererat menuju Singapura dan Malaysia. Hal ini mengokohkan fungsi Kepri sebagai hub logistik regional. Pada fase Cetak Biru pertama (2007–2011), kawasan Batam–Bintan–Karimun (BBK) dipromosikan sebagai zona perdagangan bebas, mempercepat integrasi ekonomi lintas batas serta memperkuat iklim investasi di wilayah ini.

Dalam rentang 2012–2016, Kepri semakin menancapkan pijakan dalam koridor ekonomi laut, berperan dalam mendukung alur perdagangan regional. Infrastruktur pelabuhan dan fasilitas intermoda diperkuat, memudahkan arus barang dan jasa dengan biaya lebih efisien. Selain itu, kerjasama lintas sektor—mulai perikanan hingga pariwisata bahari—menunjukkan bahwa Kepri tak sekadar transit point, melainkan juga penggerak aktivitas ekonomi lokal. Pada periode terkini (2017–2021 dan 2022–2026), orientasi bergeser ke digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi mikro. Batam bertransformasi menjadi simpul inovasi digital, sementara Bintan dan Natuna didorong mengembangkan ekosistem UMKM yang terhubung dengan platform elektronik. Inisiatif ini diharapkan mendorong inklusivitas pertumbuhan, mereduksi ketimpangan antardaerah, dan memperkuat ketahanan ekonomi perbatasan di tengah dinamika geopolitik dan tantangan keamanan maritim.

Perluasan IMT-GT dalam gambar 1.3 *IMT-GT Reconfigured and Proposed Economic Corridors* melalui penggabungan Ekonomi Koridor 6 (*Economic Corridors/EC 6*), yang mencakup Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor, Melaka, Johor, Pattani, Yala, Narathiwat mendorong integrasi kawasan ini menjadi lebih dekat dengan Singapura sebagai simpul utama pertumbuhan ASEAN dan pusat teknologi tinggi global. Integrasi ini memungkinkan optimalisasi sinergi ekonomi antarwilayah yang saling melengkapi serta membuka peluang investasi dari negara anggota kemitraan dan kawasan sekitarnya. Selain itu, pengembangan IMT-GT sejalan dengan ASEAN *Comprehensive Recovery Framework (ACRF)* yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020, serta berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-8 yang berfokus pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, IMT-GT berperan strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi regional sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Gambar 1.3 *IMT-GT Reconfigured and Proposed Economic Corridors*



Sumber: Blueprint IMT-GT 2022-2026 (2022)

Berdasarkan Gambar 1.3 IMT-GT Reconfigured and Proposed Economic Corridors, keenam EC ini akan melibatkan dari implementasi dari physical connectivity projects (PCP). PCP melaksanakan dibidang transportasi, TIK, digital, listrik, pengelolaan limbah, pasokan air, dll. Adanya *physical connectivity projects* (PCP) akan membantu transformasi IMT-GT serta realisasi visi IMT-GT 2036 (Rai et al., 2019). Dari situasi ini, *physical connectivity projects* (PCP) sebagai tulang punggung integrasi IMT-GT dan Master Plan konektivitas ASEAN. Integrasi *sub regional* akan mempercepat konektivitas dari pengembangan 6 EC ini. Peningkatan konektivitas perbatasan untuk mendapatkan interaksi yang lebih mudah dan sederhana. Untuk mengubah koridor dari transport-centric menjadi dynamic EC, *cross border value chains* dan *special economic zone* (SEZ) dan zona ekonomi di sepanjang koridor akan dipromosikan. Dalam prioritas kinerja strategis blue print IMT-GT 2022-2026 dalam jangka 5 (lima) tahun lebih menekankan pada pengembangan economic corridor (EC) (Ernovianti, 2017). EC ini diklasifikasikan menjadi 6 (enam) wilayah koridor ekonomi. Pengoptimalan EC ini didukung dari

sumber daya yang tersedia guna untuk mempercepat integasi ekonomi. Peran dari IMT-GT untuk mendukung, mengarahkan sumber daya yang dimiliki daerah memberikan peluang dan kontibusi pada pengembangan koridor ekonomi regional dapat dilihat dalam

Koridor ekonomi keenam (EC 6) diusulkan oleh Thailand dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-24 yang diadakan di Melaka pada 1 Oktober 2018. Para menteri mengarahkan agar sebuah studi dilakukan untuk menentukan rute yang diusulkan untuk koridor ini. Rute yang diusulkan untuk EC6 dipertimbangkan untuk menghubungkan provinsi selatan Thailand Pattani, Yala, dan Narathiwat dengan pantai timur Malaysia melalui Perak dan Kelantan, dan dengan Indonesia di Selatan bagian dari Sumatera dapat dilihat di gambar 1.2 Peta Sebaran Koridor Ekonomi (EC) IMT-GT. Pembangunan daerah di Sumatera dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan. Kedua pendekatan ini tercermin dalam koridor pertumbuhan yang ditunjuk dan berbasis pulau pemerataan atau koridor distribusi yang merata. Koridor pertumbuhan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan. Kawasan pertumbuhan yang telah diidentifikasi dalam rencana tersebut ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan regional, KEK, kawasan industri, kawasan pariwisata strategis nasional, serta kota dan kawasan aglomerasi perkotaan di kabupaten dan kota yang berada di koridor pertumbuhan. Koridor pemerataan berorientasi pada penyediaan pelayanan dasar yang lebih merata (Avianto & Koestoer, 2015; Fadhil, 2023; IMT-GT Vision 2036, 2018).

Faktor geografis yang dimiliki oleh Kepulauan Riau dapat memnafaatkan perkembangan kerja sama antar negara lainnya. Wewenang yang telah diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah akan terus memanfaatkan kepada keberlanjutan Paradiplomasi. Paradiplomasi akan memberikan untuk pengembangan Kerja sama sub regional didaerah perbatasan (Putri, 2019). Melalui IMT-GT pelaksanaan dalam konektivitas yang akan dijalankan oleh sub regional kearah yang lebih progresif. Dalam situasi ini, paradiplomasi harus didesain lebih progresif untuk merespon semangat daerah menjalin kerja sama di tingkat internasionalis serta memahami peluang yang ada untuk pembangunan daerah di Indonesia. Paradiplomasi menjadi salah satu tolak ukur dari berkesinambungan visi IMT-GT 2036 dan ACRF.

Kepulauan Riau sebagai salah satu anggota IMT-GT akan berpotensi memberikan kontribusi di wilayah perbatasan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa daerahnya diberikan keistimewaan seperti Batam, Bintan dan Karimun menjadi wilayah FTZ/SEZ sehingga jika ini diproyeksikan dengan maksimal maka, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau akan meningkat serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Bahkan, di tahun 2023 Kepulauan Riau dicanangkan menjadi tuan rumah IMT-GT ini membuktikan bahwa, Kepulauan Riau memiliki beragam potensi diantaranya pariwisata, ekonomi, UMKM, perikanan, pertambangan serta lainnya. KEK terletak di sini provinsi—KEK Galang Batang dekat Tanjungpinang (Pulau Bintan) dan KEK Tanjung Kelayang di Kepulauan Belitung. Batam-Bintan dan Bangka Belitung juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam RPJMN 2020–2024. Batam (Kepulauan Riau), Tanjungpinang (Bintan), Pangkalpinang (Bangka), dan Tanjung Pandan (Belitung)

memiliki kegiatan ekonomi inti yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui keterkaitan dengan EC6 dan EC3 serta koridor ekonomi lainnya. EC6 bersinggungan dengan EC3 di Palembang.

Wilayah Kepulauan Riau termasuk dalam pengembangan ini sehingga bertujuan untuk mendorong Gross Domestic Product (GDP) yang menjadi kesepakatan bersama antarnegara, penciptaan lapangan kerja dan terintegrasinya industri domestik pada global value chain dengan pendekatan sub regional yang terintegrasi, inovatif, inklusif dan berkelanjutan. Di tahun 2023, Kepulauan Riau memiliki kehormatan karena menjadi tuan rumah dalam forum IMT-GT, berharap akan mendapatkan dampak yang positif bagi Kepulauan Riau serta untuk Indonesia secara luas (Diskominfo Kepri, 2023). Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam menarik investor asing untuk melakukan penanaman modal. Namun, kesuksesan ini akan lebih efektif dengan penerimaan masyarakat Kepulauan Riau yang meningkatkan untuk bergerak maju. Peluang Kepulauan Riau menjadi tuan rumah dapat menguatkan posisi Kepulauan Riau dalam Kerja sama IMT-GT serta meningkatkan infrastruktur transportasi, pelabuhan, fasilitas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar perdagangan dan konektivitas antar negara anggota IMT-GT melakukan pergerakan barang dan jasa di awasan IMT-GT. Peluang lainnya dapat memfasilitasi kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta guna terciptanya wadah diskusi dalam upaya memperluas kerja sama ekonomi di bawah kerangka IMT-GT (Srifauzi & Fajrina, 2023). Bahkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setelah terjadinya pandemik Covid-19. Akselerasi ekonomi ini didorong juga oleh pertumbuhan investasi di wilayah perbatasan, salah satunya telah selesainya pembangunan jaringan Base Transceiver Station (BTS) sebagai akibat Kepri menjadi stasiun peluncuran satelit Satria-1 (Satelit Republik Indonesia). Kepulauan Riau memiliki potensi lainnya seperti di sektor industri ataupun pariwisata. Implementasi dari IMT-GT ini Kepri akan mengembangkan industri halal dengan adanya Bintang Halal Hub, industri teknologi digital di Nongsa Digital Park, industri MRO serta adanya KEK Galang Batang. Wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membantu memperkuat peran Indonesia di Selat Malaka (Anggarkasih & Resma, 2022).

Terjalinya kemitraan ini akan memperkuat komunitas bisnis dan pemerintah daerah. Para pemimpin akan mempromosikan intik berfokus pada investor. IMT-GT merupakan kerjasama sub regional yang cangkupannya lebih luas dibanding SIJORI (Singapore, Johor dan Riau). Pembentukan IMT-GT ini sebagai tindak lanjut dari pengemabngan kerja sama yang telah terjalin antara pengusaha-pengusaha swasta dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dengan demikian, pengembangan kerja sama ekonomi *sub regional* IMT-GT sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata hingga berkeseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang telah dimiliki masing-masing wilayah. Sektor ekonomi yang dipilih dalam penelitian ini karena memberikan aspek kecepatan dan ketepatan serta dipertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Sector ekonomi juga mendukung konektivitas penguatan di kawasan tersebut seperti perdagangan, investasi, pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, IMT-GT juga bersinergi pada

Sustainable Development Goals (SDGs) ke 8 dalam hal ekonomi (Kemenperin: Menperin: IMT-GT Dorong Kerja Sama Dengan Stakeholder, Wujudkan Pertumbuhan Sub regional, 2022).

IMT GT telah membawa pembangunan infrastruktur dan industri yang signifikan di Batam dan Tanjungpinang (Bintan) sesuai dengan tujuan Indonesia untuk menjadikan Batam sebagai pusat regional untuk industri, logistik, dan pariwisata. Proposal Malaysia untuk memasukkan Johor dalam EC4 akan memungkinkan peluang peninjauan Kembali untuk Kerja sama antara Johor dan Kepulauan Riau. Jarak yang jauh antara Sumatera Selatan dan Thailand Selatan telah membuat sulit untuk membangun hubungan ekonomi yang kuat antara kedua daerah. Kepulauan Riau tidak memiliki hubungan langsung laut dan udara dengan Thailand Selatan. Perdagangan Kepulauan Riau dengan Thailand kecil, menyumbang rata-rata hanya 1,14% terhadap ekspor provinsi dari 2014-2018, dan kurang dari 1% untuk impor. Namun demikian, Kepulauan Riau dapat berfungsi sebagai titik transit untuk perdagangan luar negeri dari Sumatera bagian selatan yang memiliki pangsa perdagangan yang signifikan dengan Thailand, terutama Jambi (12,89%), Lampung (4,63%), dan Bengkulu (2,98%). Untuk Bengkulu, akan membutuhkan Palembang (Sumatera Selatan) untuk mengangkut komoditas mereka melalui darat ke pelabuhan di pantai timur Sumatera. Kepulauan Riau juga bisa menjadi titik transit bagi Kepulauan Bangka Belitung, karena tingkat pertumbuhan rata-rata gabungan perdagangannya dengan Thailand pada 2014-2018 tinggi di 44,06%, sehingga menjanjikan untuk meningkatkan kinerja perdagangan di masa depan.

EC6 dapat memainkan rantai pasokan domestik, di mana produk hulu dan tengah dari provinsi Sumatera bagian selatan, seperti CPO, karet, lada putih, dan produk perikanan mentah, dapat diproses di kawasan industri dan zona ekonomi khusus yang terletak di Kepulauan Riau. Hal ini akan sejalan dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Batam sebagai hub logistik internasional bagi Indonesia. Masuknya provinsi Sumatera bagian selatan (Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung) bersama dengan Kepulauan Riau sebagai titik transit dan pusat kawasan industri, memiliki potensi besar dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Malaysia dan Thailand melalui jaringan koridor ekonomi IMT-GT (Guina, 2023).

Dimensi kerja sama sub regional IMT-GT tidak dapat dilepaskan dari peran aktor-aktor strategis yang terdistribusi di berbagai tingkatan, mulai dari internasional, nasional, hingga lokal. Di tataran internasional, keberadaan Centre for IMT-GT Sub regional Cooperation (CIMT) memainkan peran sentral sebagai entitas pengoordinasi lintas negara yang bertugas mengintegrasikan rencana kerja dan kebijakan antaranggota. Sementara itu, Joint Business Council (JBC) menjadi forum utama bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan proyek ekonomi kawasan. Keterlibatan lembaga keuangan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) turut memperkuat dimensi teknokratis kerja sama ini, khususnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan inisiatif konektivitas sub regional. Singapura, meskipun bukan negara anggota IMT-GT, tetap memainkan peran strategis melalui hubungan ekonomi regional yang erat, terutama dengan Johor di Malaysia dan Kepulauan Riau di Indonesia.

Pada level nasional, keterlibatan pemerintah pusat menjadi krusial dalam mengarahkan kebijakan dan memastikan integrasi antara agenda IMT-GT dengan prioritas pembangunan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia berperan sebagai focal point nasional yang mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung inisiatif sub regional ini. Kementerian teknis seperti Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR memiliki kontribusi penting dalam pengarusutamaan kebijakan pembangunan infrastruktur, perencanaan wilayah, dan peningkatan konektivitas antardaerah. Sinergi lintas sektor ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama IMT-GT, tetapi juga memungkinkan wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau untuk lebih terlibat aktif dalam dinamika ekonomi regional. Sementara itu, di tingkat lokal, aktor-aktor daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengimplementasikan kebijakan dan program IMT-GT secara konkret. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pemerintah kota dan kabupaten, seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, bertanggung jawab dalam penerjemahan rencana strategis ke dalam program nyata, termasuk fasilitasi investasi, promosi perdagangan lintas batas, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal. Selain itu, dukungan dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil semakin penting dalam membangun basis data yang akurat dan memperkuat proses pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dengan optimalisasi peran aktor lokal, wilayah perbatasan Kepulauan Riau berpeluang menjadi simpul konektivitas strategis dalam struktur ekonomi sub regional IMT-GT yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, daerah perbatasan harus memperkuat sistem ekonomi mereka melalui kegiatan kerja sama. Pemerintah dan gerakan koperasi harus bekerja sama agar masyarakat di perbatasan tidak merasa diabaikan dalam perbaikan ekonominya. Artinya kita ingin kondisi ekonomi masyarakat di daerah perbatasan cukup baik. Tujuan dari pemberdayaan koperasi di daerah perbatasan adalah untuk melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat lokal dari negara tetangga. Gerakan koperasi memiliki beberapa konsep, yaitu: mendirikan koperasi sebagai lembaga pemersatu people. Begitu mereka bersatu, rasa memiliki dan keterikatan sebagai sesama anggota koperasi akan muncul. Dengan demikian, semangat kebersamaan atau gotong royong yang dikembangkan di daerah perbatasan dengan kondisi yang kurang menggembirakan merupakan stimulan yang dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. (Anomsari & Razak, 2017)

KESIMPULAN

Fenomena globalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap intensifikasi kerja sama subregional, termasuk melalui inisiatif Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Skema kerja sama ini berperan sebagai kerangka integratif yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperkuat konektivitas ekonomi lintas negara, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, IMT-GT tidak hanya menjadi forum koordinatif antarnegara anggota, melainkan juga instrumen

strategis dalam mendukung arsitektur integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau, yang secara geografis berada pada posisi strategis di wilayah perbatasan, menunjukkan signifikansi tersendiri dalam struktur kerja sama IMT-GT. Letaknya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadikan provinsi ini sebagai simpul penting dalam jaringan konektivitas kawasan. Peran tersebut diperkuat melalui partisipasi aktif dalam berbagai agenda IMT-GT, termasuk sebagai tuan rumah pertemuan tingkat regional pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya pengakuan atas kapasitas dan relevansi Kepulauan Riau dalam mendukung tujuan strategis kerja sama sub regional.

Berdasarkan hasil analisis, Kepulauan Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam menopang pembangunan sub regional, baik dari sisi sumber daya alam, posisi geografis, maupun warisan sosial budaya. Karakteristik ini menempatkan wilayah tersebut sebagai kawasan yang prospektif dalam pengembangan sektor perdagangan lintas batas, logistik, pariwisata, dan investasi. Dengan demikian, Kepulauan Riau tidak hanya memiliki fungsi geostrategis, tetapi juga peran geoekonomi yang kian menonjol dalam dinamika regional. Selain itu, keterlibatan aktif dalam IMT-GT turut membuka ruang bagi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Interaksi antarpemangku kepentingan di dalam kerangka kerja sama ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mengelola isu-isu lintas batas secara kolaboratif. Hal ini juga memperkuat peran pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam mendukung implementasi kebijakan kerja sama regional secara efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama sub regional semacam IMT-GT tidak semata-mata berfungsi sebagai wadah koordinasi negara-negara anggota, tetapi juga sebagai ruang strategis bagi daerah perbatasan untuk mengambil peran yang lebih substantif dalam integrasi ekonomi kawasan. Kepulauan Riau menjadi contoh konkret bagaimana wilayah yang sebelumnya berada di pinggiran dapat mengalami reposisi strategis dalam konteks pembangunan regional dan internasional. Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama sub regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle memiliki peran signifikan dalam mendorong akselerasi pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Pengalaman Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa sinergi antara potensi daerah dan skema kerja sama lintas negara dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi konektivitas kawasan yang inklusif, *resilient*, dan berdaya saing di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Affizah AM, D., & N, R. (2015). Convergence Behaviour of Growth Triangle: The Case Of IMT-GT. *Business and Economics Journal*, 7 (2).
<https://doi.org/10.4172/2151-6219.1000205>

- Agung Suhabi Putra, & Nurhasan Affandi. (2022). Peran Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Promosi Ekspor Produk Pertanian Ke Mesir. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(10). <https://Sosains.Greenvest.Co.Id/Index.Php/Sosains/Article/View/497/1035>
- Anggarkasih, M. G., & Resma, P. S. (2022). The Importance of Halal Certification for The Processed Food by Smes to Increase Export Opportunities. *E3S Web of Conferences*, 348. <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202234800039>
- Anomsari, A., & Razak, M. (2017). Cooperative Empowerment in The Border Area of Imt-Gt in Increasing Economy and Nationalism with The Spirit of Togetherness and Mutual Cooperation. *The 2nd Of International Seminar on Reinforcement Of IMT-GT For Strengthening of Border Region*.
- Avianto, B. R., & Koestoer, R. H. (2015). DISTORSI KAPASITAS PERDAGANGAN INTER-REGIONAL IMT-GT Kasus Provinsi Terpilih di Sumatera Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 44. <https://doi.org/10.23917/JEP.V11I1.333>
- Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Kepulauan Riau.
- Candra, R., Maulida, S., & Sativa Anjani, R. (2024). Halal Industry Development in Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (Imt-Gt): An Analysis of Islamic Diplomacy in Enhancing Regional Cooperation and Economic Development. *The 2nd Iconities*.
- CIMT. (2022). IMT-GT IMPLEMENTATION BLUEPRINT 2022 - 2026.
- Diskominfo Kepri. (2023). Kepulauan Riau Sukses Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan IMT-GT 2023. *Diskominfo Kepri*. <https://www.kepriprov.go.id/Berita/Pemprov-Kepri/Kepulauan-Riau-Sukses-Menjadi-Tuan-Rumah-Penyelenggaraan-Pertemuan-Imt-Gt-2023>
- Ernovianti, E. And N. H. A. (2017). Influence Of External Forces on Bank Recapitalization. *Journal Of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 3(2).
- Fadhil, S. (2023). Legal Aspects of Investment in The Framework Imt-Gt Sub-Regional Economic Cooperation (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) In Indonesia. *Literacy: International Scientific Journals of Social, Education and Humaniora*, 2(1). <http://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/LITERACY>
- Faridatussalam, S. R., Wahyuningrum, D., & Anggraini, C. D. (2023). Does Human Capital and Gender Equality Affect Economic Growth for Ten Province in Sumatera? *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.30596/IJBE.V5I1.16339>

- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), 75–94. <https://doi.org/10.14710/lp.v1i1.10430>
- Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interoperabilitas TNI Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Mewujudkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara (Studi Kasus Di Laut Natuna Utara). *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2), 119–127. <https://doi.org/10.24198/Aliansi.v1i2.39582>
- Gambaran Umum Kepulauan Riau. (2020). Retrieved October 12, 2023, From https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi/publik/28/1__BAB_I_PENDAHULUAN.pdf
- Global Connectivities. (2024). The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle – Deepening Sub Regional Integration. https://globalconnectivities.com/2024/03/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle/?utm_source=chatgpt.com
- Guina, C. S. (2023). Review And Assessment of The Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle Economic Corridors: Integrative Report.
- Hadi Nugroho, S., Sukandari, B., Bandono, A., & Sri Suharyo, O. (2020). The Applications of Model Bayesian Networks for Analysis and Preventive Actions on Maritime Security Operations. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3). www.ijstr.org
- IMT-GT Vision 2036. (2018).
- Keating, M. (2000). Paradiplomacy And Regional Networking. *Forum Of Federations: An International Federalism*, 613, 10.
- Kemenperin: Menperin: IMT-GT Dorong Kerja Sama Dengan Stakeholder, Wujudkan Pertumbuhan Sub Regional. (2022). <https://kemenperin.go.id/artikel/23548/menperin:-imt-gt-dorong-kerja-sama-dengan-stakeholder,-wujudkan-pertumbuhan-sub-regional>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory And Practice of Paradiplomacy* (C. Bjola & M. Kornprobst, Eds.). Routledge.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy (Kerjasama Luar Negeri Oeh Pemda di Indonesia)*. The Phinisi Press.
- Munir, F., Mochamad Yani, Y., Dharma Negara, S., & Sumadinata, R. W. S. (2021). Strengthening Of Substate Actors in Comparative Advantage of Sijori

(Singapore-Johor-Riau Islands) Border Areas Colaboration. *Journal Of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(08), 2585. <https://www.slideshare.net/fransdione/sustainable>

Pangemanan, A., Azmi Ibrahim, Bundhi Tri Suryanti, Fajar Hermansah, & Pragyaa Rihesvar Brahma Putra. (2021). Upaya Diplomasi Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(2).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2022). Tentang Kepri. <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>

Putri, R. A. (2019). Menakar Paradiplomasi Batam Dalam Lingkup Free Trade Zone Melalui Analisis Isi Regulasi. *Islamic World and Politics*, 3(2).

Raharjo, S. N. I. (2023). Review And Assessment of The Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle Economic Corridors: Indonesia Country Report.

Raharjo, S. N. I., Irewati, A., Rahman, A. R., Pudjiastuti, T. N., Luhulima, C., & Nufus, H. (2017). Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), 69–83. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/695>

Rai, S. M., Brown, B. D., & Ruwanpura, K. N. (2019). SDG 8: Decent Work and Economic Growth – A Gendered Analysis. *World Development*, 113, 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.006>

Riawan, W., & Akbar. (2024). Transformasi Ekonomi Daerah Kepulauan Riau Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Triple Konsep: Pariwisata, Ekonomi Biru, Dan Kerjasama Internasional Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). *Jurnal Archipelago*, 3(01), 29–40. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.92>

Rosnani, R., Heryadi, D., Yani, Y. M., & Sinaga, O. (2022). ASEAN Maritime Security Cooperation. *The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 16(3). https://pdfs.semanticscholar.org/5ae3/D680b8732ee404ee94acd46365a7f07a3dd9.pdf?_ga=2.202099601.1803475626.1673014949-163488572.1673014949

Septiani, R. D. (2021). Implementasi Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle (Imt-Gt) Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh Tahun 2015-2019. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(4).

Srifauzi, A., & Fajrina, S. (2023). Peluang Dan Tantangan Aceh Pada Forum Kerjasama Imt-Gt (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) Dalam Peningkatan Investasi Asing. *PIR Jurnal*, 8(1).

Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.

Try Setyasih, E., Heru Purwanto, B., & Jusuf Sp, E. (2020). Strategic Policy for Acceleration and Optimization of Border Area Development. *Pasundan Social Science Development*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.56457/PASCIDEV.V1I1.5>

United Nations ESCAP. (2017). *Enhancing Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and The Pacific*. United Nations Publication.

Wong Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2020). Cross-Border Integration, Cooperation and Governance: A Systems Approach for Evaluating “Good” Governance in Cross-Border Regions. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 37(5), 1047–1070. <https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855227>

Xiaodong, X. (2019). The SIJORI Growth Triangle: Progress, Problems and Prospect. *Journal Of Maritime Studies and National Integration*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/JMSNI.V3I1.4473>